

KIK
Pid 14/01
Swa
m

SKRIPSI

STRIKES AND LOCKOUTS

INDRI ESTRELITA SWANDARIN

**MOGOK SEBAGAI SALAH SATU SARANA
TERCAPAINYA TUNTUTAN BURUH**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**MOGOK SEBAGAI SALAH SATU SARANA
TERCAPAINYA TUNTUTAN BURUH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS AKHIR
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131878388

Penyusun,

Indri Estrelita Swandarin
NIM. 039614431

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

birokrasi perijinan untuk mogok bagi buruh dalam peraturan tersebut terlalu berbelit-belit. Mogok merupakan perwujudan pendidikan demokrasi dari hak buruh dalam berorganisasi dan berunding agar dapat menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu kebijakan pengendalian buruh melalui mekanisme pemberitahuan untuk mogok kepada pengusaha dan Pemerintah harus dibatasi.

- b. Aksi mogok yang dilakukan oleh buruh dapat efektif apabila ada kekompakan di antara para buruh sendiri. Bagi pengusaha apabila ada ajakan berunding dari buruh maka pengusaha hendaknya langsung mau untuk berunding sehingga masalah yang ada tidak menjadi berlarut-larut, dan buruh hendaknya diposisikan sebagai mitra yang sejajar dan bukan hanya sebagai aset perusahaan, sehingga Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dapat tercipta. Dan bagi Pemerintah dalam membuat peraturan Perburuhan hendaknya jangan membuat peraturan yang tumpang tindih yang hanya mementingkan kepentingan investasi (pembangunan), tetapi hendaknya membuat Peraturan Perburuhan yang bersifat adil.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian dan pembahasan tentang Mogok Sebagai Salah Satu Sarana Tercapainya Tuntutan Buruh, adalah:

- a. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur dan mengijin buruh untuk mogok, tetapi dalam prakteknya buruh dibatasi untuk melakukan aksi mogok. Alasan adanya pembatasan aksi mogok buruh, adalah karena kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah untuk memberi peluang berkembangnya investasi guna menunjang pembangunan di Indonesia, sehingga Pemerintah kemudian mengeluarkan sejumlah Peraturan Perburuhan yang mengijinkan buruh untuk mogok tetapi pada prakteknya membatasi buruh untuk mogok.
- b. Pada kenyataannya ada aksi mogok buruh yang dilakukan dengan damai dan yang diwarnai dengan kekerasan. Mogok, baik yang dilakukan dengan damai maupun yang diwarnai dengan kekerasan sama-sama mempunyai kesempatan untuk berhasil maupun gagal, meskipun aksi mogok tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

2. Saran

Saran-saran yang mungkin berguna bagi kita semua diantaranya, adalah:

- a. Pemerintah segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, karena prosedur